

EVALUASI KEBIJAKAN DISIPLIN SANTRI DI PONDOK PESANTREN AL-HAROMAIN: PERSPEKTIF MODEL CIPP (CONTEXT, INPUT, PROCESS, PRODUCT)

Imam Bahauddin¹, Titin Nurhidayati², Halimatus Sa'diyah³

¹Universitas Al-Falah Assunniah Kencong, Indonesia

²Universitas Al-Falah Assunniah Kencong, Indonesia

³Universitas Al-Falah Assunniah Kencong, Indonesia

Email: bahauddin88@gmail.com¹, titinnurhidayati@uas.ac.id²,

halimatus.sadiyah0199@gmail.com³

E-Issn: 3063-8313

Received: Juni 2026

Accepted: Juni 2026

Published: Juli 2026

Abstract :

This research is motivated by the suboptimal implementation of student discipline policies in Islamic boarding schools (pesantren), despite being conceptually designed to foster character and discipline based on Islamic values. This study aims to evaluate student discipline policies and identify factors influencing their effectiveness. The method used was a qualitative case study approach, with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation of caregivers, administrators, religious teachers, and students. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model with the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation framework. The results indicate that while the discipline policies have relevant objectives, their implementation has been suboptimal due to weak policy communication, limited resources, inconsistent enforcement, and the absence of clear standard operating procedures. Consequently, changes in student behavior have been uneven, and repeated violations are still found. This study concludes that the success of discipline policies is largely determined by the quality of implementation, thus necessitating strengthening aspects of governance, consistency, and internalization of spiritual values in fostering student discipline.

Keywords: discipline policies, Islamic boarding schools, CIPP model, policy implementation, Islamic education

Abstrak :

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan disiplin santri di pondok pesantren, meskipun secara konseptual telah dirancang untuk membentuk karakter dan kedisiplinan berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan disiplin santri serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengasuh, pengurus, ustadz, dan santri. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan kerangka evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan disiplin memiliki tujuan yang relevan, namun implementasinya belum optimal akibat lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, inkonsistensi penegakan aturan, serta belum adanya standar operasional prosedur yang jelas. Dampaknya, perubahan perilaku santri belum merata dan masih ditemukan pelanggaran berulang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan disiplin sangat ditentukan oleh kualitas implementasi, sehingga diperlukan penguatan pada aspek tata kelola, konsistensi, serta internalisasi nilai-nilai spiritual dalam pembinaan disiplin santri.

Kata kunci: kebijakan disiplin, pesantren, model CIPP, implementasi kebijakan, pendidikan Islam.



PENDAHULUAN

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moralitas, dan kedisiplinan santri secara holistik. Berbeda dengan lembaga pendidikan formal pada umumnya, pesantren tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pembinaan akhlak dan internalisasi nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, disiplin menjadi salah satu pilar utama dalam sistem pendidikan pesantren karena berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter, pengendalian diri, serta penanaman tanggung jawab sosial dan religius. Disiplin di pesantren tidak sekadar dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi merupakan bagian dari proses *ta'dib*, yaitu pembinaan adab yang berorientasi pada kesadaran internal berbasis iman dan ketakwaan. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan disiplin santri seringkali belum berjalan secara optimal. Berbagai bentuk pelanggaran, seperti ketidakpatuhan terhadap jadwal, keterlambatan dalam kegiatan, serta pelanggaran tata tertib lainnya, masih ditemukan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan praktik di lapangan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek kedisiplinan santri di pesantren. Studi Fauzi dan Mokhtar (2024) menunjukkan bahwa budaya pesantren dan sistem reward-punishment memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter disiplin santri. Sementara itu, Hidayat (2025) menekankan pentingnya keteladanan kyai sebagai faktor utama dalam membangun kedisiplinan, karena kyai berperan sebagai figur sentral yang menjadi rujukan perilaku santri. Penelitian lain oleh Purnanda et al. (2026) mengungkap bahwa pendekatan disiplin yang terlalu represif berpotensi menimbulkan dampak negatif, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif. Selain itu, Ahlaqih dan Romadlon (2024) menemukan bahwa persepsi santri terhadap aturan juga memengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap kebijakan disiplin.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek implementasi kebijakan disiplin secara parsial dan belum mengkaji kebijakan tersebut secara komprehensif melalui pendekatan evaluasi yang sistematis. Kajian yang mengintegrasikan evaluasi kebijakan dengan teori implementasi modern dalam konteks pendidikan Islam, khususnya pesantren, masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menggunakan model evaluasi yang mampu mengidentifikasi hubungan antara konteks kebijakan, sumber daya, proses implementasi, dan hasil yang dicapai secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan adanya *research gap* dalam kajian kebijakan disiplin santri, khususnya dalam hal evaluasi kebijakan yang terintegrasi dengan perspektif teoritis modern.

Untuk menjawab kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam sebagai kerangka utama dalam menganalisis kebijakan disiplin santri. Model ini dipilih

karena memiliki keunggulan dalam mengevaluasi kebijakan secara komprehensif, mulai dari aspek konteks, input, proses, hingga produk. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Namun demikian, penggunaan model CIPP saja belum cukup untuk menjelaskan kompleksitas implementasi kebijakan di lapangan, sehingga diperlukan integrasi dengan teori implementasi kebijakan modern.

Dalam konteks ini, penelitian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang menekankan empat variabel utama dalam keberhasilan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif Michael Lipsky yang menyoroti peran aktor pelaksana di tingkat lapangan (*street-level bureaucrats*) yang memiliki diskresi dalam menerjemahkan kebijakan. Perspektif ini penting untuk memahami mengapa kebijakan yang secara normatif telah dirancang dengan baik, dalam praktiknya dapat mengalami distorsi atau inkonsistensi. Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kritis dari Michel Foucault yang memandang disiplin sebagai mekanisme kontrol yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berhubungan dengan pembentukan kesadaran individu.

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi kebijakan disiplin santri di pondok pesantren berdasarkan model CIPP, (2) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan disiplin dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dan *street-level bureaucracy*, serta (3) merumuskan model disiplin integratif yang menggabungkan nilai-nilai pendidikan Islam dengan pendekatan kebijakan modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai kondisi empiris kebijakan disiplin, tetapi juga menawarkan analisis kritis dan solusi konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi antara model evaluasi pendidikan (CIPP), teori implementasi kebijakan modern, dan nilai-nilai pendidikan Islam dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat deskriptif, penelitian ini menempatkan kebijakan disiplin sebagai fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, dan aktor pelaksana. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan model disiplin integratif pesantren yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kontrol eksternal dan internalisasi nilai spiritual, sehingga diharapkan mampu menghasilkan perubahan perilaku santri yang lebih berkelanjutan. Dengan kontribusi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan Islam, khususnya dalam kajian kebijakan pendidikan berbasis pesantren.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis

penelitian studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kebijakan disiplin santri dalam konteks alami (*natural setting*) di lingkungan pondok pesantren. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, serta pengalaman subjek penelitian secara komprehensif, sehingga menghasilkan pemahaman yang holistik terhadap implementasi kebijakan disiplin.

Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014). Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya berfokus pada hasil kebijakan, tetapi juga pada proses dan dinamika yang terjadi selama implementasi kebijakan disiplin di pesantren.

Jenis penelitian studi kasus digunakan karena penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam suatu fenomena spesifik dalam konteks tertentu, yaitu kebijakan disiplin santri di pondok pesantren. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang rinci, kontekstual, dan berbasis realitas empiris. Pendekatan ini relevan digunakan dalam penelitian kebijakan pendidikan karena mampu menangkap kompleksitas interaksi antara aktor, struktur, dan budaya organisasi (K. Yin, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Haromain yang dipilih secara purposif. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa pesantren tersebut memiliki sistem kebijakan disiplin santri yang terstruktur dan representatif untuk dikaji dalam perspektif evaluasi kebijakan.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan yang meliputi beberapa tahapan, yaitu: Tahap persiapan (penyusunan instrumen dan perizinan), Tahap pengumpulan data, Tahap analisis data, Tahap penyusunan laporan penelitian. Subjek penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam kebijakan disiplin santri. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2020).

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi: Pengasuh/Kyai sebagai pengambil kebijakan, Pengurus pesantren sebagai pelaksana kebijakan, Ustadz/Guru sebagai pengawas dan pendidik, Santri sebagai subjek kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik *snowball sampling* untuk memperluas sumber data berdasarkan rekomendasi dari informan awal. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang lebih kaya dan mendalam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, Data sekunder diperoleh dari dokumen pesantren, buku tata tertib santri, arsip pelanggaran dan literatur ilmiah yang relevan. Kombinasi kedua jenis data ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kelengkapan informasi yang diperoleh.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan tujuan

memberikan fleksibilitas kepada informan dalam menyampaikan informasi. Wawancara digunakan untuk menggali: latar belakang kebijakan proses implementasi kendala yang dihadapi Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, wawancara merupakan teknik utama dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang mendalam dan kontekstual (B. Miles & Huberman, 1994).

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas santri dan pelaksanaan kebijakan disiplin di pesantren. Fokus observasi meliputi: kepatuhan terhadap aturan kedisiplinan waktu interaksi antara pengurus dan santri Observasi ini penting untuk memperoleh data faktual yang tidak selalu dapat diungkap melalui wawancara. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti sendiri (human instrument). Peneliti berperan sebagai pengumpul data, analisis, sekaligus penafsir data (Moleong, 2017).

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui analisis dokumen tertulis, seperti: tata tertib santri buku pedoman laporan pelanggaran. Dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti empiris yang mendukung data hasil wawancara dan observasi.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi: (B. Miles & Huberman, 1994).

1. Reduksi Data Proses seleksi, penyederhanaan, dan pengorganisasian data.
2. Penyajian Data (Data Display) Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan.
3. Penarikan Kesimpulan Interpretasi data untuk menghasilkan temuan penelitian.

Analisis dilakukan dengan pendekatan model CIPP sehingga data diklasifikasikan menjadi: context, input, process dan product. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang sistematis dan komprehensif terhadap kebijakan disiplin.

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Triangulasi Sumber Membandingkan data dari berbagai informan
2. Triangulasi Metode Menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi
3. Member Check Mengonfirmasi hasil data kepada informan
4. Kecukupan Referensi Menggunakan literatur ilmiah sebagai pembanding

Menurut Norman K. Denzin, triangulasi merupakan teknik penting untuk meningkatkan keabsahan data dalam penelitian kualitatif (Denzin, 1978).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan disiplin santri di pondok pesantren secara normatif telah dirancang dengan tujuan yang jelas, yaitu membentuk karakter santri yang disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak

mulia. Namun demikian, temuan empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan implementasinya di lapangan. Kesenjangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural dalam implementasi kebijakan pendidikan di lingkungan pesantren.

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah bahwa kelemahan kebijakan disiplin tidak terletak pada perumusan kebijakan, melainkan pada tahap implementasi. Dalam perspektif George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980a).

Berdasarkan hasil penelitian, keempat variabel tersebut menunjukkan kelemahan yang signifikan. Pertama, aspek komunikasi kebijakan belum berjalan optimal, yang ditunjukkan oleh rendahnya pemahaman santri terhadap tujuan dan makna aturan disiplin. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan hanya disampaikan secara formal tanpa diiringi proses internalisasi nilai. Kedua, keterbatasan sumber daya, terutama jumlah pengurus dan minimnya pelatihan, menyebabkan pengawasan tidak berjalan efektif. Ketiga, disposisi pelaksana terlihat dari adanya perbedaan sikap dan pendekatan antar pengurus dalam menegakkan aturan. Keempat, ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) menunjukkan lemahnya struktur birokrasi dalam kebijakan tersebut.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa kegagalan kebijakan seringkali bukan disebabkan oleh desain kebijakan yang buruk, melainkan oleh lemahnya implementasi (Dunn, 2018). Dalam konteks ini, kebijakan disiplin santri sebenarnya memiliki potensi untuk berhasil, namun tidak didukung oleh sistem implementasi yang memadai.

Temuan penting lainnya adalah adanya inkonsistensi dalam penegakan aturan, yang ditunjukkan oleh perbedaan perlakuan antar pengurus terhadap pelanggaran yang sama. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *street-level bureaucracy* yang dikemukakan oleh Michael Lipsky (Lipsky, 1980a).

Menurut Lipsky, pelaksana kebijakan di tingkat lapangan memiliki diskresi yang besar dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan. Diskresi ini muncul karena keterbatasan sumber daya, tekanan kerja, serta kompleksitas situasi yang dihadapi. Dalam konteks pesantren, pengurus sebagai pelaksana kebijakan disiplin berperan sebagai *street-level bureaucrats* yang memiliki kewenangan dalam menentukan bentuk penegakan aturan.

Akibatnya, kebijakan yang secara normatif bersifat seragam berubah menjadi beragam dalam praktiknya. Inkonsistensi ini tidak hanya menurunkan efektivitas kebijakan, tetapi juga berdampak pada menurunnya legitimasi aturan di mata santri. Santri cenderung melihat aturan sebagai sesuatu yang fleksibel dan bergantung pada individu pengurus, bukan sebagai sistem yang mengikat secara kolektif.

Lebih lanjut, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kualitas aktor pelaksana. Tanpa adanya standar yang jelas dan sistem pengawasan yang kuat, diskresi pelaksana justru dapat

menjadi sumber distorsi kebijakan (B., 2015). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pelaksana serta standarisasi prosedur untuk meminimalisasi variasi dalam implementasi.

Dari perspektif substantif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan disiplin yang diterapkan masih cenderung berorientasi pada kontrol eksternal melalui sistem sanksi (*punishment-oriented*). Meskipun pendekatan ini mampu menekan pelanggaran dalam jangka pendek, namun belum efektif dalam membentuk kesadaran internal santri.

Hal ini sejalan dengan pandangan Michel Foucault yang menyatakan bahwa disiplin merupakan mekanisme kontrol yang dapat membentuk perilaku, tetapi jika hanya bersifat represif, maka perubahan yang dihasilkan cenderung bersifat sementara (Foucault, 1977a). Dalam konteks ini, disiplin yang berbasis hukuman hanya menghasilkan kepatuhan semu (*compliance*), bukan kesadaran intrinsik (*internalization*).

Dalam perspektif pendidikan Islam, disiplin seharusnya tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga melibatkan proses internalisasi nilai melalui pembiasaan (*ta'wid*) dan latihan (*riyadhah*). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan disiplin yang efektif harus mengintegrasikan aspek struktural dan spiritual secara simultan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam membentuk perilaku disiplin yang berkelanjutan disebabkan oleh kurangnya integrasi antara aturan formal dan pembinaan nilai. Oleh karena itu, kebijakan disiplin perlu direkonstruksi agar tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran moral dan spiritual santri.

Penggunaan model CIPP dalam penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kebijakan disiplin, mulai dari konteks hingga hasil. Model ini memungkinkan identifikasi masalah secara sistematis, sehingga dapat diketahui bahwa kelemahan utama terletak pada aspek input dan proses.

Namun demikian, model CIPP memiliki keterbatasan dalam menjelaskan dinamika aktor dan struktur kebijakan. Oleh karena itu, integrasi dengan teori implementasi kebijakan dan *street-level bureaucracy* menjadi penting untuk memberikan analisis yang lebih mendalam. Pendekatan integratif ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan tidak cukup hanya melihat hasil, tetapi juga harus memahami proses dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan, khususnya dalam konteks pesantren, memerlukan pendekatan multidimensional yang menggabungkan evaluasi program, teori kebijakan, dan nilai-nilai pendidikan Islam. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam kajian kebijakan pendidikan Islam yang selama ini cenderung bersifat normatif dan deskriptif.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi teori implementasi kebijakan dalam konteks pendidikan Islam, khususnya pesantren. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, disposisi,

dan struktur birokrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan kebijakan disiplin.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa perbaikan kebijakan disiplin tidak cukup dilakukan pada level aturan, tetapi harus mencakup:

1. Penguatan komunikasi kebijakan
2. Peningkatan kapasitas pengurus
3. Penyusunan SOP yang jelas
4. Integrasi pendekatan spiritual dan humanis

Dengan demikian, kebijakan disiplin dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pembentukan karakter santri yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kebijakan disiplin santri di pondok pesantren secara normatif telah dirancang dengan tujuan yang baik, yaitu membentuk karakter santri yang disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara tujuan kebijakan dan praktik di lapangan. Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh kelemahan pada aspek implementasi, yang mencakup komunikasi kebijakan yang belum efektif, keterbatasan sumber daya, perbedaan disposisi pelaksana, serta belum adanya SOP yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan.

Selain itu, ditemukan adanya inkonsistensi dalam penegakan aturan akibat besarnya diskresi pengurus sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lapangan. Kondisi ini menyebabkan aturan disiplin tidak diterapkan secara seragam dan berdampak pada menurunnya legitimasi kebijakan di kalangan santri. Di sisi lain, pendekatan disiplin yang masih dominan bersifat punishment-oriented belum sepenuhnya mampu membentuk kesadaran internal santri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas pelaksana, penyusunan SOP yang jelas, serta integrasi pendekatan spiritual dan humanis agar kebijakan disiplin dapat berfungsi lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- B., G. P. (2015). *American Public Policy*. CQ Press.
- B. Miles, M., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. sage.
- creswell, john w. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act*. McGraw-Hill.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis*. Routledge.
- Edwards III, G. C. (1980a). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Edwards III, G. C. (1980b). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press,.
- Foucault, M. (1977a). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Pantheon Books.

- Foucault, M. (1977b). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Pantheon Books.
- K. Yin, R. (2018). *Case Study Research and Applications*. sage.
- Lipsky, M. (1980a). *Street-Level Bureaucracy*. Russell Sage Foundation.
- Lipsky, M. (1980b). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.